
**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI PADA KABUPATEN BANGKALAN**

Moh Naylur Rahman¹, Mohammad Djasuli²

Universitas Trunojoyo Madura
email : ilunkspenda123456789@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Meskipun daerah tersebut telah menerapkan desentralisasi fiskal, namun perkembangan ekonominya masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan, dengan hasil menunjukkan peningkatan rata-rata tingkat desentralisasi fiskal sebesar 11,52% selama 10 tahun (2014-2023) yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja keuangan pemerintah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan yang diukur melalui PDRB Riil mengalami kenaikan rata-rata 0,63% dalam periode yang sama. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 96,3%, menunjukkan hubungan yang kuat dan positif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Kabupaten Bangkalan dapat lebih memanfaatkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD dan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih optimal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Desentralisasi Fiskal merupakan elemen penting dalam penerapan otonomi suatu daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangandan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Dalam perkembangan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, ada beberapa langkah penting yang telah diambil. Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini menandai dimulainya era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Setelah beberapa tahun berjalan, pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan dua undang-undang baru sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan undang – undang ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan dan memperkuat implementasi desentralisasi fiskal serta otonomi daerah di Indonesia.

Pembahasan mengenai desentralisasi merupakan salah satu fokus yang menarik. Konsep desentralisasi sendiri telah banyak dikaji dan diterapkan di berbagai negara bukan hanya di Indonesia saja. Upaya desentralisasi erat kaitannya dengan dorongan untuk memberdayakan daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan publik. Menurut Saragih (2003:830), desentralisasi fiskal dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung berjalannya tugas pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, sehingga daerah harus diberdayakan untuk bertindak secara lokal dengan tetap menjaga sudut pandang nasional. Sementara itu, Henri Maddick (1983:19-20) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan kebijakan pengalihan kekuasaan dari pemerintah kepada entitas sub-pemerintah, yang meningkatkan kemampuan pejabat pemerintahan untuk merumuskan program daerah dengan lebih responsif dan mengantisipasi permasalahan sebelum masalah tersebut muncul, serta menambah pengetahuan mereka tentang kondisi regional. Oentatro S.M (2001:28) juga menyatakan bahwa desentralisasi adalah praktik politik pemerintah federal dan pemerintah daerah yang berbagi wewenang atau kekuasaan.

Program desentralisasi fiskal Indonesia bertujuan untuk melakukan transisi pemerintahan dari sistem terpusat ke sistem desentralisasi. Menurut Bangun (2009), desentralisasi merupakan alat atau instrumen yang diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang efisien, bertanggung jawab, dan transparan. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan anggaran pembangunan di wilayahnya masing – masing. Hal ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bangkalan, salah satu wilayah di Pulau Madura, juga telah mengimplementasikan desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Namun, perkembangan ekonomi di Kabupaten Bangkalan masih relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Fakta menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bangkalan belum dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 16.037,98 ribu rupiah. Pada tahun 2022, PDRB per kapita tersebut meningkat menjadi 25.134,32 ribu rupiah. Selanjutnya, pada satu tahun terakhir, PDRB perkapita kembali meningkat menjadi 25.408,14 ribu rupiah. Angka PDRB perkapita tersebut menempatkan Kabupaten Bangkalan pada posisi ketiga terendah di antara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga semakin bertambah. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan bertambah menjadi 215,56 ribu orang sekitar 21,57% dari total penduduk. Ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 204,00 ribu orang atau 20,56% dari total penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 sebanyak 1.071.712 orang. Peningkatan angka kemiskinan ini didasarkan pada hasil sensus yang dilakukan pada bulan Maret 2022. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) menyatakan bahwa peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, yaitu hanya sebesar Rp. 432.046 ribu.

Kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap situasi nyata di Kabupaten Bangkalan dan melakukan penyesuaian besar-besaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, namun implementasi desentralisasi fiskal nampaknya belum tercapai. Oleh sebab itu, perlu dilakukan investigasi mendalam mengenai sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi desentralisasi fiskal, yang tercermin dalam komponen – komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dan pengembangan kebijakan terkait desentralisasi fiskal di tingkat lokal. Hal ini menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh institusi yang berwenang. Data tersebut tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber – sumber yang sudah ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Data APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bangkalan untuk periode 2014-2023, yang diperoleh melalui akses internet dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bangkalan untuk periode 2014-2023, diperoleh melalui akses internet yang bersumber dari situs web BPS Kabupaten Bangkalan <https://bangkalankab.bps.go.id>, serta situs resmi pemerintahan Kabupaten Bangkalan lainnya. Penelitian ini mencakup periode 10 tahun, yaitu dari 2014 hingga 2023. Dengan menggunakan data sekunder dari sumber-sumber resmi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang akurat dan relevan terkait dengan kondisi dan perkembangan di Kabupaten Bangkalan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara rinci mengenai variabel-variabel yang diteliti. Di sisi lain, analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis kuantitatif dilakukan melalui perhitungan matematis dan penggunaan rumus regresi berikut :

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Rumus untuk menghitung DDF adalah sebagai berikut :

$$\text{DDF} : \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan, penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana dilakukan dengan cara menghitung dan menganalisis hubungan antara variabel independen (derajat desentralisasi fiskal) dan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Melalui analisis regresi linear sederhana, penulis dapat menentukan seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah dapat memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah (Halim, 2004). Pendapatan secara umum diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dalam periode tertentu, yang dapat berasal dari upah, pendapatan dari kekayaan, maupun pembayaran transfer dari pemerintah (Samuelson dan Nordhaus, 1993). Semakin besar nilai PAD suatu daerah, menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Ketika kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah semakin tinggi, hal ini menunjukkan kondisi keuangan daerah yang baik dan mendukung penerapan otonomi daerah.

Rata-rata nilai derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014 hingga 2023 mengalami peningkatan sebesar 11,52%. Pada tahun 2014, nilai derajat desentralisasi fiskal tercatat sebesar 8,26%, kemudian terus meningkat hingga mencapai 14,87% pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 nilai tersebut turun menjadi 9,79%, tetapi kembali naik pada tahun 2019 menjadi 11,24%. Di tahun 2020, nilai derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bangkalan kembali mengalami penurunan menjadi 10,89%, tetapi terus meningkat kembali hingga mencapai 14,77% pada tahun 2023. Meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, nilai derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bangkalan cenderung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,52% selama periode 2014 hingga 2023. Informasi mengenai perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2023

Tahun	PAD	Realisasi	%	DDF
2014	135,79	1.643,10	100	8,26
2015	175,62	1.787,70	100	9,82
2016	200,08	1.831,92	100	10,92
2017	325,53	2.188,06	100	14,87
2018	199,26	2.034,16	100	9,79
2019	262,26	2.331,63	100	11,24
2020	233,18	2.140,81	100	10,89
2021	271,66	2.275,10	100	11,94
2022	281,90	2.220,22	100	12,69
2023	352,76	2.387,84	100	14,77
Rata - Rata				11,52

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah seringkali dinilai berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonominya. Meningkatnya kegiatan ekonomi yang meningkatkan output barang dan jasa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang dicapai, pendapatan nasional riil harus dihitung dengan menggunakan harga tetap. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu perekonomian (Sukirno, 1991).

Perkembangan ekonomi merupakan aspek kunci yang mendefinisikan prospek jangka panjang suatu perekonomian daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan perekonomian di suatu daerah dalam jangka waktu panjang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah selama jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu daerah, atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh gabungan seluruh sektor ekonomi. Tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan memberikan gambaran mengenai kemajuan perekonomian suatu daerah (Todaro & Smith, 2008). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dapat dianalisis melalui data PDRB riil berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha.

Tabel 2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangkalan
Tahun 2014-2023

Tahun	PDRB	PDRBt-1	PDRBt - PDRBt-1	%	PE
2014	17.369.266,21	16.204.066,26	1.165.259,95	100	7,9
2015	16.906.844,50	17.369.266,21	-462.381,71	100	-2,66
2016	17.018.646,64	16.906.844,50	111.802,14	100	0,66
2017	17.618.600,84	17.018.646,64	599.954,2	100	3,52
2018	18.361.440,03	17.618.600,84	742.839,19	100	4,21
2019	18.550.799,01	18.361.440,03	189.358,98	100	1,03
2020	17.514.617,16	18.550.799,01	-1.036.181,85	100	-5,58
2021	17.152.799,17	17.514.617,16	-361.837,99	100	-2,06
2022	16.959.909,28	17.152.799,17	-192.869,89	100	-1,12
2023	17.164.195,01	16.959.909,28	204.285,73	100	1,20
Rata - Rata					0,63

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan tabel data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014 hingga 2023, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut mengalami fluktuasi yang tidak optimal. Rata-rata pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 0,63% per tahun. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,9%, namun kemudian menurun tajam menjadi -2,66% di tahun 2015. Meskipun kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2016 (0,66%), 2017 (3,52%), dan 2018 (4,21%), tren positif ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan hingga 1,03%. Penurunan yang lebih drastis terjadi di tahun-tahun berikutnya, yaitu -5,58% pada 2020, -2,6% pada 2021, dan -1,12% pada 2022. Namun, di tahun terakhir 2023, pertumbuhan ekonomi Bangkalan kembali membaik dengan angka 1,20%. Dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Bangkalan mengalami fluktuasi yang tidak stabil, dengan rata-rata pertumbuhan yang relatif rendah.

Desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan kewenangan dan sumber pendanaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

Ketika pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur alokasi dana sesuai potensi dan kebutuhan lokal, mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendukung pengembangan sektor unggulan daerah. Meskipun demikian, keberhasilan inisiatif ini juga tergantung pada kesiapan kemampuan dan tata kelola pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Penerapan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bangkalan memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dapat dibuktikan secara empiris melalui perhitungan regresi linear sederhana menggunakan program SPSS 25.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, terlihat adanya hubungan positif yang kuat antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Nilai F hitung yang diperoleh adalah 209.771 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat digunakan untuk memprediksi variabel Desentralisasi Fiskal, atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Desentralisasi Fiskal (X) terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil ini mengindikasikan adanya pengaruh yang kuat dari penerapan desentralisasi fiskal di Kabupaten Bangkalan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Untuk memperjelas hasil analisis, dapat dilihat dari tabel ANOVA dan tabel Model Summary regresi linear berikut ini :

Tabel 3

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 ^a	.963	.959	.75573
a. Predictors: (Constant), Desentralisasi Fiskal				

Berdasarkan tabel Model Summary hasil uji regresi linear sederhana, nilai korelasi atau hubungan (R) antara variabel Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0,981. Selanjutnya, diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,963. Hal ini berarti bahwa 96,3% pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh Variabel Desentralisasi Fiskal. Dengan kata lain, pengaruh variabel bebas (Desentralisasi Fiskal) terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi) adalah sebesar 96,3%. Sisanya, sebesar 3,7%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel.

KESIMPULAN

Rata-rata derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan sebesar 11,52% selama kurun waktu sepuluh tahun antara tahun 2014 hingga tahun 2023. Variasi nilai desentralisasi fiskal mempunyai dampak yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya berkontribusi terhadap kemajuan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bangkalan pada periode yang sama mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,63% yang ditentukan oleh Produk Domestik Regional Bruto Riil (PDRB) atas dasar harga konstan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bangkalan telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan kemajuan yang cukup kuat dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan sebesar 96,3%. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun faktor-faktor lain menyumbang 3,7% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan, namun desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang signifikan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.

REFERENSI

- Elsye, Rosmery. *Desentralisasi Fiskal*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2013. <http://eprints.ipdn.ac.id>
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Bangun, Andarias. "Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang)." *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*. (2009)
- Al-Aksari, Sirajudin. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 6, No.1 (2017) : 54-62*
- Santosa, B.P. Rahayu P.R. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor - Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri." *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP) Volume 2, No 1 (2005) : 9-18*
- Asmuruf, F.M. Rumat, A.V dan Kawung M.V.G. "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15, No. 05 (2015) : 727 - 737*
- Nuraini, Ida. "Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur." *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global" 17 Mei (2017) : 79-93* <https://semnas.unikama.ac.id/feb/>
- Hasibuan. Kartika, A. Suwito. dan Agustin L. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 4, Nomor 3 (2022) : 683 : 693*
- Anonim, Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Anonim, Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Anonim, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Anonim, Undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Desentralisasi.